



Buletin

Parlementaria

Nomor 1020/II/VIII/2018 • Agustus 2018

Komisi IV Lepasliarkan Kanguru di TN Wasur



9 772614 339005

Masyarakat Harus Berperan Aktif Sosialisasikan Bahaya Narkoba



Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI melepasliarkan kanguru di Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Komisi IV Lepasliarkan Kanguru di TN Wasur

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI berkesempatan melepasliarkan kanguru di Taman Nasional (TN) Wasur, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, agar dapat hidup di alam bebas. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena, semua rombongan turut melepas kanguru yang merupakan satwa yang dilindungi itu.

Pelepasliaran kanguru ini merupakan komitmen Komisi IV DPR RI dalam menjaga kelestarian satwa kanguru yang ada di Papua, sehingga kanguru

tidak saja ada di Australia. Masyarakat Merauke pun memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian alam dan satwa.

“Kita lepasliarkan kanguru ini untuk dapat hidup di Taman Nasional Wasur.

Kami berharap kanguru ini dapat hidup secara bebas di alam Papua yang indah ini. Semoga kita bisa terus menjaga keanekaragaman hayati dan satwa yang di Taman Nasional Wasur ini,” kata



Foto: Hendral | HR

Michael, di TN Wasur, Merauke, Papua, Senin (30/7).

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra menuturkan, tingginya peran serta masyarakat dalam ikut melestarikan kanguru bisa menjadi modal yang besar dalam mewujudkan pariwisata baru di Merauke.

“Kita bisa melihat kawasan yang dipenuhi kanguru. Hal tersebut tentunya akan menjadi destinasi wisata unggulan Merauke. Begitu juga dengan rusa. Betapa indahny kalau ada tempat yang bisa kita kunjungi dengan melihat gerumulan hewan seperti kanguru dan rusa,” ungkap Bagus Adhi.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, TN Wasur ini akan lebih menarik jika dilengkapi dengan penangkaran dan pendampingan yang sangat ketat. Sehingga kualitasnya bisa diandalkan.

“BKSDA mesti berperan aktif di sini dalam meningkatkan populasi kanguru dan melatihnya menjadi hewan yang jinak dan menjadi ramah pada pengunjung,” tutur Bagus Adhi.

Bagus Adhi meyakini jika kawasan TN Wasur dikelola dengan baik, maka tak menutup kemungkinan Merauke akan identik dengan kanguru. Dan kanguru menjadi hewan kebanggaan Merauke, dan bisa bersaing dengan daerah Australia.

Diketahui, Kanguru Papua ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan Kanguru Australia. Di Papua terdapat dua jenis kanguru, ada kanguru tanah dan kanguru pohon yang keduanya sebenarnya masuk dalam kategori langka sehingga termasuk satwa yang dilindungi dari kepunahan.

Kanguru pohon sebagian besar masa hidupnya ada di pohon. Sekalipun begitu satwa tersebut juga sering turun ke tanah, misalnya bila sedang mencari air minum.

Moncong kanguru pohon bentuknya lebih runcing jika dibandingkan dengan moncong kanguru tanah. Ekornya agak panjang dan bulat, berbulu lebat dari pangkal sampai ekornya.

Sedangkan pada kanguru tanah, kedua kaki depannya lebih pendek dari pada kaki belakangnya, cakarnya pun lebih kecil. Moncongnya agak tumpul dan tidak berbulu. Ekornya makin meruncing ke ujung, bulunya tidak begitu lebat. ■ [hs/sf](#)

RALAT

Pada halaman 14 Buletin Parlemenaria Nomor 1020/II/VIII/2018, terdapat artikel berjudul “Komisi IX Temukan Pasien BPJS Beli Obat Sendiri”. Terdapat kekeliruan penulisan pada alinea pertama dan caption foto.

Pada alinea pertama tertulis kalimat, “Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri yang memimpin kunjungan kerja...”. Seharusnya kalimat tersebut ditulis, “Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri yang memimpin kunjungan kerja...”. Demikian juga pada caption foto, seharusnya ditulis “Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri pimpin...”.

Atas kekeliruan tersebut, Redaksi Parlemenaria memohon maaf sebesar-besarnya. Ralat ini menjadi pelurusan atas kekeliruan penulisan berita tersebut. Terima kasih dan mohon maklum.



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Gerald Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Foto: Jaka | HR

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meninjau Taman Teknologi Pertanian (TTP) Plus di Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

DPR dan Pemerintah Terus Berusaha Wujudkan Kedaulatan Pangan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI dan pemerintah terus berusaha mewujudkan kedaulatan pangan. Sebab, Indonesia sebagai negara agraris mempunyai sumber pangan domestik yang sangat besar. Sehingga, penyediaan pangan nasional harus dipasok dari dalam negeri.

Bamsuet, sapaan akrabnya, saat acara serah terima Taman Teknologi Pertanian Plus (TTPP) di Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Rabu (08/8) mengatakan, setidaknya ada empat strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan stabilitas ketersediaan dan harga pangan.

“Pertama, meningkatkan produktivitas pangan secara berkelanjutan. Kedua, meningkatkan rantai nilai tambah dan menurunkan kehilangan hasil pascapanen.

TTPP ini juga dapat berfungsi sebagai pusat diseminasi teknologi dan inkubasi bisnis bagi masyarakat. Sehingga dapat berfungsi sebagai wadah pelatihan bagi calon-calon pengusaha muda, sekaligus media konsultasi bagi pelaku bisnis setempat.

Ketiga, memitigasi atau mengadaptasi terhadap perubahan iklim dan mengurangi risiko produksi. Keempat, mempromosikan pemasaran serta perdagangan yang adil dan efisien,” papar Bamsuet.

Balitbang Pertanian membangun TTPP di lahan seluas 10 hektar di Gresik yang diperoleh dari hibah swasta Polowijo Gosari Grup. Serah terima TTPP dilakukan oleh Kepala Balitbang Pertanian Muhammad Syakir kepada Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto. Selain Ketua DPR RI yang



didampingi sejumlah Anggota DPR RI, hadir juga perwakilan Kementerian Pertanian dan Pemprov Jawa Timur.

Bamsuet meminta pihak Polowijo Gosari Group selaku pengelola TTPP bisa memanfaatkan keberadaan TTPP untuk mengembangkan teknologi pertanian di Gresik lebih masif lagi. Khususnya, dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian lokal. Tak hanya di bidang pertanian semata, melainkan juga merambah ke peternakan serta pengolahan hasil pasca panen.

“TTPP ini juga dapat berfungsi sebagai pusat diseminasi teknologi dan inkubasi bisnis bagi masyarakat. Sehingga dapat berfungsi sebagai wadah pelatihan bagi calon-calon pengusaha muda, sekaligus media konsultasi bagi pelaku bisnis setempat. Manfaatkan keberadaan TTPP ini dengan sebaik mungkin,” imbau politisi Partai Golkar ini.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini berharap kehadiran TTPP juga dapat melahirkan inovasi-inovasi teknologi pertanian yang tepat guna, serta menjadi pusat agribisnis di Kabupaten Gresik dan wilayah disekitarnya. TTPP dapat pula dikembangkan sebagai destinasi agrowisata yang dapat mengundang kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara.

“Mari kita jadikan TTPP ini sebagai tempat yang menyenangkan bagi masyarakat. Menyenangkan untuk meraih ilmu pengetahuan, serta menyenangkan untuk mengoptimalkan fungsinya dalam menambah nilai ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan. Apabila kita dapat memanfaatkan keberadaan TTPP ini dengan sebaik-baiknya, maka saya yakin Gresik akan terus menjadi lokomotif kedaulatan pangan di Indonesia,” terangnya.

Bamsuet berjanji akan terus mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk memperbanyak serta memperluas penyebaran TTPP di seluruh pelosok Tanah Air, sehingga dapat menggairahkan para praktisi pertanian, peneliti, maupun penyuluh untuk melakukan kajian guna meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas usaha tani.

“Jika pertanian kita maju serta kedaulatan pangan terwujud, maka pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. *Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo*,” pungkas Bamsuet.

■ jk/sf

Penyusunan UU DPR Sudah Sesuai Rencana

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menegaskan sejauh ini, DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang sudah sesuai rencana atau *on the track*. Ada UU yang tiap tahun dibuat, yakni UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bedanya dengan UU lain, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada UU APBN merupakan inisiatif dari pemerintah, sedangkan UU non APBN DIM-nya dari DPR RI atau pemerintah.

Demikian ditegaskan Utut pada diskusi Dialektika Demokrasi yang mengambil tema menyoroti ‘Kinerja Legislasi DPR RI’, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (02/8). Hadir pula dalam acara ini, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing dan pakar hukum tata negara Prof. Jimly Assidqi.

Dalam pembahasan RUU APBN, lanjut Pimpinan DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, karena DIM-nya dari pemerintah, maka DPR RI hanya menyetujui atau tidak. Sejauh ini DPR RI sudah mengesahkan UU APBN dan APBN-P 2015, UU APBN dan APBN-P 2016, UU APBN dan APBN-P 2017 dan UU APBN 2018, namun tidak ada APBN Perubahan.

Dijelaskan pula bahwa, selama masa 4 tahun periode 2014-2019 ini, DPR RI telah menghasilkan setidaknya 60 UU. Dalam pembahasan UU, menurutnya tidak mudah, dalam setahun hanya menghasilkan 15 UU.

Dari beberapa UU tersebut, yang cukup menonjol dan sangat diingat adalah UU pemilu yang sekarang masih di uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

UU Pemilu itulah yang membuat sekarang *parlemen threshold* harus naik 4 persen, atau 23 kursi DPR RI. RUU itu diketok tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 01.00 dini hari. “Jadi UU itu pula yang mengatur bahwa Presiden harus mendapat dukungan 20 persen suara atau gabungan suara parpol, soal pembagian kursi dan hal lain terkait Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019,” jelasnya.

UU lain yang berhasil disahkan adalah UU Perppu Ormas, UU Tax Amnesty, lalu menyusul UU Anti Terorisme yang diketok tanggal 25 Mei lalu. Lebih lanjut Utut mengatakan, salah satu kinerja yang menjadi ukuran bagi Anggota Dewan adalah seberapa banyak legislasi yang dihasilkan.

“Ini selalu didengung-dengungkan, di satu sisi kita tahu, setiap UU implikasinya pasti ke biaya, selain itu perlunya aturan turunan berupa perda-perda. Karena ini semangat zamannya individualistis, maka kunci wilayah perbaikannya *legal drafter* diperkuat. Selain itu wilayah optimasi perbaikannya, naskah akademik mestinya dikerjakan jauh lebih lama,” tambah politisi dapil Jawa Tengah itu. ■ mp/sf



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto

Foto: Jayadi | HR

Peluncuran Buku Fahri Hamzah Ungkap Garis Batas Kemiskinan yang Labil



Foto: Runiti | HR

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membubuhkan tanda tangannya pada peluncuran buku berjudul 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera'

Tambang Emas Ilegal di NTB Berdampak Serius

Tambang emas ilegal yang dieksplorasi masyarakat Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem. Ini jadi catatan kritis Komisi VII DPR RI saat sidak ke pertambangan emas ilegal, dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika.

“Pertambangan rakyat di Lombok Tengah jadi catatan penting ketika kita mengunjungi secara langsung. Penggalian emas dilakukan tidak dengan rencana yang baik. Terasa menjadi kegiatan yang secara sistemik *ngawur*. Itu akan berisiko besar,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto usai mengikuti pertemuan dengan Wakil Gubernur NTB di Mataram, NTB, Selasa (31/7).

Pencemaran lingkungan yang akan terjadi, kata politisi PDI Perjuangan ini, adalah rusaknya ekosistem setempat. Belum lagi bahaya debu dan bau dari limbah tambang ilegal yang sangat mengganggu. Ini jadi PR besar bagi pemerintahan baru di NTB yang pada 17 September nanti akan terjadi suksesi

dari pemerintahan lama.

“Pekerjaan yang dilakukan pemerintahan saat ini sudah cukup baik. Kita berharap pada proses pergantian nanti masalah yang berhubungan dengan penambangan emas rakyat harus dimasukkan dalam memori serah terima pemerintahan provinsi. Ini penting supaya tidak mengganggu wajah NTB,” imbuh politisi dari dapil Jateng II itu.

Daryatmo menjelaskan, pihaknya sedang menginisiasi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ada perubahan kewenangan yang terjadi.

Dalam UU Minerba, bahan galian yang ada di kabupaten jadi kewenangan bupati. Sekarang dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan itu ditarik ke provinsi. PR besar pemerintahan baru di NTB nanti adalah menegakkan konsistensi tata ruang, perencanaan wilayah, kehendak politik, dan pengusaha sumber daya alam. ■ mh/sf



Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto

Foto: Husen | HR

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meluncurkan buku berjudul 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera'. Dalam buku ini, diungkapkan tentang kesalahan umum dalam memandang dan memahami persoalan kemiskinan di Indonesia. Di antaranya soal garis batas kemiskinan yang labil, dan sangat memungkinkan pemerintah melakukan 'lying by statistics' atau pembohongan publik melalui data statistik.

“ Apa yang kita lihat di masyarakat, kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan adalah kontras dari megahnya indikator-indikator ekonomi yang kita punya,” papar Fahri di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/8).

Menurutnya, buku 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera, Sebuah Upaya Merekonstruksi Makna dan Indikator Kesejahteraan' berisi kritik atas perhitungan pertumbuhan ekonomi atau *Gross Domestic Product* (GDP) yang selama ini disalahpahami sebagai alat ukur kesejahteraan dan kritik atas pengukuran kemiskinan yang diterapkan di Indonesia.

Fahri telah menulis empat judul buku, sebelumnya berhubungan dengan fungsi dan tugasnya saat menjabat posisi di berbagai komisi

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu mengatakan, ide buku ini muncul dari kegelisahannya sejak lama. “Pada tahun ke-4 sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat, saya perlu meninggalkan warisan tentang tugas yang saya jalani, dan ini baru

buku pertama dari beberapa buku berikutnya dengan tema sama,” ungkap politisi dapil NTB itu.

Dalam acara peluncurannya, buku ini dibedah oleh ekonom Fuad Bawazier, Guru Besar Rokhmin Dahuri dan Tenaga Ahli Kesra DPR RI Gianto. Diskusi ini dimoderatori oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Dauly. Peluncuran ini pun dihadiri oleh berbagai kalangan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pun turut memberikan sambutan sebelum diskusi digelar. Hadir juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Fahri telah menulis empat judul buku, sebelumnya berhubungan dengan fungsi dan tugasnya saat menjabat posisi di berbagai komisi. Tercatat buku sebelumnya berjudul 'Negara, Pasar dan Rakyat', 'Demokrasi, Transisi Korupsi', 'Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat', dan 'Kemana Ujung Century' yang ditulisnya saat aktif di Pansus Bank Century. ■ *eko/sf*

LRT Jadi Solusi Kurangi Kemacetan

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban menilai kemacetan di berbagai daerah masih menjadi pusat perhatian. Maka dari itu berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dari menghadirkan moda transportasi baru hingga pemberlakuan ganjil genap. Hadirnya *Light Rapid Transport* (LRT) dinilai menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan.

“ Kami mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemacetan. Salah satunya adalah hadirnya moda transportasi LRT di Palembang ini. Selain untuk mendukung suksesnya Asian Games, hadirnya moda transportasi ini juga sangat bermanfaat untuk jangka panjang bagi masyarakat,” ungkapnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau fasilitas LRT di Palembang, Sumsel, Senin (30/08).

Politisi Partai NasDem itu berharap, dengan adanya moda transportasi alternatif itu, dan diharapkan kemacetan akan berkurang. Bahkan pihaknya sudah mencoba menggunakan LRT dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II

ke Kompleks Olahraga Jakabaring yang memakan waktu 45 menit.

“Angkat jempol untuk LRT. Kita sudah nikmati perjalanan 45 menit dari bandara ke Jakabaring. Angkutan ini dapat menguntungkan masyarakat. LRT sangat bagus di ibu kota. Hanya saja di hulu harus disiapkan tempat parkir. Jangan sampai malah macet,” ungkap politisi dapil Sumut itu.

Di tempat berbeda Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan LRT bukan sekadar transportasi untuk mengangkut atlet dan *official* dari bandara ke Jakabaring, tetapi juga langkah awal untuk mengantisipasi kemacetan kota Palembang pada 2020 mendatang.

“Jadi adanya LRT merupakan aksi nyata untuk meminimalkan kemacetan di



Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban

Foto: Ria | HR

Palembang. Selain antisipasi kemacetan sejak dini, keberadaan LRT juga untuk mengubah perilaku masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum,” tutupnya. ■ *rnm/sf*

Kasus Perdagangan Orang di NTT Masih Tinggi

Komisi III DPR RI memberikan perhatian serius pada masih tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Terlebih saat ini Komisi III DPR RI bersama pemerintah sedang berupaya merampungkan RUU Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana masalah TPPO itu menjadi salah satu bagian yang akan diatur dalam RUU KUHP tersebut.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik

Foto: Deprian | IHR

“ NTT merupakan salah satu daerah yang tinggi sekali tindak pidana perdagangan orangnya. Seperti kasus yang terkenal yaitu Nirmala Bonar yang disiksa oleh majikannya di Malaysia,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kupang, NTT, Kamis (02/8).

Erma menyampaikan, ada hal yang dikritisi dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI kali ini, yaitu mengenai penggunaan pasal TPPO oleh pihak

Kejaksanaan dan Kepolisian. “Masih ada *miss* antara polisi dan jaksa dalam penggunaan pasal dalam kasus TPPO. Oleh karena itu kami sarankan agar ada koordinasi yang baik antar penyidik dari kepolisian dengan jaksa peneliti dari kejaksanaan. Sehingga ketika kasus ini sudah masuk ke pengadilan, maka menjadi kasus yang kuat,” jelasnya.

Dengan demikian para pelaku TPPO bisa di hukum secara maksimal bukan lagi di hukum minimal, sambung politisi Fraksi Demokrat itu.

Selain itu, Komisi III juga melihat adanya persoalan infrastruktur yang dialami oleh mitra kerja Komisi III DPR RI di NTT. Seperti yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT yang menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya secara

Masyarakat Harus Berperan Aktif Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Peredaran narkoba di Indonesia sudah sampai pada taraf memprihatinkan. Gencarnya penyebaran narkoba di kota-kota besar di seluruh Indonesia merupakan ancaman serius bagi generasi penerus bangsa. Untuk itu, Anggota Komisi III DPR RI Muslim mengajak semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan bahaya narkoba.

akan adanya sinergitas yang terbangun diantara mitra kerja Komisi III dari pertemuan yang dilakukan ini. Sehingga berbagai permasalahan yang ada, seperti masalah *over capacity* lapas dan peredaran narkoba tersebut bisa segera mendapatkan solusinya,” ucapnya.

“ Kita berharap kepada semua pihak, khususnya pada anggota masyarakat agar berperan serta dalam mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Karena (narkoba) ini merupakan ancaman bagi generasi penerus bangsa kita,” ujar Muslim di sela-sela kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (30/7).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, berdasarkan laporan yang diungkapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, penanganan bahaya narkoba masih mengalami berbagai kendala keterbatasan, baik keterbatasan dari sisi anggaran maupun dari sisi fasilitas lainnya.

“Oleh karenanya, kita berharap



Anggota Komisi III DPR RI Muslim

Foto: Chasbil | IHR

Berdasarkan laporan yang diungkapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, penanganan bahaya narkoba masih mengalami berbagai kendala keterbatasan, baik keterbatasan dari sisi anggaran maupun dari sisi fasilitas lainnya.

maksimal, karena wilayah NTT merupakan kepulauan.

“Labuan Bajo sebagai daerah destinasi wisata, potensi untuk bisa terpapar bahaya narkotikanya tinggi. Tetapi sampai sekarang belum ada kantor BNN-nya. Kami paham untuk membentuk satu kantor itu harus dengan persetujuan Kementerian PAN-RB,” ucap Erma.

Terkait jumlah Polres yang ada di NTT, Erma mengatakan bahwa dari 22 kabupaten kota, hanya ada 16 Polres. “Berarti masih ada kekurangan 5 Polres. Inilah yang harus menjadi perhatian ekstra buat kita,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisi III DPR RI juga ingin mendapatkan laporan tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap turis asing yang dilakukan oleh oknum warga di daerah Labuan Bajo.

“Kita tahu ini dampaknya buruk sekali bagi (sektor) pariwisata. Karena kalau kita sampai tidak bisa menjamin keamanan dari turis asing, maka bisa dipastikan bahwa banyak orang tidak akan tertarik datang ke daerah ini,” pungkas politisi dapil Kalbar itu. ■ dep/sf

Segala masukan yang disampaikan oleh mitra kerja Komisi III DPR RI di Sulsel itu akan dijadikan sebagai masukan bagi DPR RI. Hal ini guna mendorong adanya peningkatan dalam masalah anggaran maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh mitra kerja Komisi III DPR RI di daerah, sambung Muslim.

Ia menyatakan, peningkatan anggaran dan peningkatan fasilitas-fasilitas yang ada tersebut bertujuan agar nantinya peralatan yang dimiliki (instansi terkait) akan menjadi lebih canggih dan tidak kalah dengan bandar-bandar narkoba dalam melakukan modus-modusnya.

“Kita tingkatkan dengan teknologi-teknologi yang lebih modern, sehingga dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum itu kinerjanya dapat menjadi lebih baik,” kata Muslim.

Diketahui saat ini, dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel, baru ada 3 kabupaten kota yang mempunyai kantor BNNK. Terhadap kondisi tersebut, Muslim akan mempertanyakan masalah itu kepada pihak BNN pusat.

“Mengapa hal itu bisa terjadi, dan kenapa permintaan akan cabang BNN di kabupaten kota lainnya dipersulit,” tutur politisi dapil Aceh itu. ■ as/sf

Komisi IV Dorong Pemerintah Bangun Pusat Pelatihan Pakan Mandiri di Sumsel

Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih Amro mengatakan akan mendorong pemerintah, dalam hal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk segera membangun Pusat Pelatihan Pakan Mandiri di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, cara yang selama ini digunakan oleh para peternak di Sumsel terbilang sudah kurang efektif, karena masih menggunakan tepung dan ikan asin.



Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih Amro memberi bantuan benih ikan dan pakan mandiri kepada masyarakat Ogan Ilir, Sumsel

Hal itu diungkapkan Fauzih di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meninjau budi daya ikan dan budi daya rawa di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Senin (30/7).

“Kita mendorong KKP untuk membuat semacam lembaga pelatihan atau kursus agar masyarakat dapat terlatih dalam budidaya ikan, bagaimana membuat pakan yang baik. Saat ini pusat pelatihannya ada di Depok, namun kita akan buat juga pusat pelatihannya di sini. Dinas Provinsi dan tanah sudah oke, tinggal anggarannya untuk 2019,” ujar Fauzih.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar menambahkan saat ini sudah ada pengganti tepung ikan yang jauh lebih efektif dan

efisien, yaitu tepung *maggot* dari Black Soldier Fly (BSF). Produk yang kaya protein, kalsium dan lengkap asam amino ini umumnya di Indonesia dipakai sebagai bahan baku pakan ternak. Selain itu tepung ini juga bisa menghemat biaya pakan hingga 83 persen.

Selain meninjau budi daya ikan, Tim Kunker IV DPR RI juga menyempatkan meninjau budi daya rawa. Menurut Fauzih optimalisasi rawa juga penting, sehingga rawa yang tidak produktif, dapat dimanfaatkan sebagai pengairan.

“Bagaimana ada kanal, bagaimana ada bendungan, sehingga kalau kering bisa ambil dari bendungan. Kita berharap dengan adanya optimalisasi rawa ini, Sumsel bisa surplus beras, dan meningkat hingga 5 juta ton,” tutup Fauzih. ■ eno/sf



Foto: Singgih | HR

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau Kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur

Legislator Gulirkan Pansus Persoalan Bukit Soeharto

Kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur sudah rusak akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh penambang-penambang liar. Agar kawasan ini bebas dari aktivitas penambangan dan mengembalikan ke fungsi awalnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mengulirkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus).

Lebih lanjut Mukhtar menyampaikan, banyak pihak-pihak yang mengambil dan mengeksplorasi batu bara *high kalori* di dalamnya, yang oleh pemerintah daerah dianggap tidak diketahui dan tidak ada kontribusi ke pemda. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran besar dan kasat mata, namun aparat hukum abai dalam proses ini, padahal aktivitas penambangan ilegal ini tidak jauh dari jalan raya dan mudah diaksesnya.

Mukhtar menegaskan persoalan Bukit Soeharto yang telah menjadi kawasan pertambangan ilegal itu dijadikan Pansus di DPR RI, agar pembahasan lebih spesifik. Karena dalam persoalan ini harus ada yang bertanggungjawab. Negara telah dirugikan, kemudian ada orang-orang yang diuntungkan namun, tidak menguntungkan bagi daerah.

“Negara tidak boleh abai terhadap persoalan ini, negara harus hadir menjaga kawasan alam Indonesia, kerusakan Bukit Soeharto tidak memberikan pendapatan terhadap daerah, tetapi justru mewariskan kerusakan lingkungan hidup kepada generasi kita selanjutnya, negara harus menunjukkan kedaulatannya,” tegas Mukhtar saat melakukan kunjungan langsung ke

kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, Selasa (31/7).

Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan Presiden Indonesia ke-6 Soeharto pada tahun 1991 yang kemudian pada tahun 2004 berubah menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup, menjaga satwa, dan melindungi pohon-pohon di kawasan tersebut.

“Bukit Soeharto ini telah menjadi *role model* bagi pengelolaan hutan Indonesia yang kemudian diapresiasi oleh dunia dan dijadikan sebagai *role model* dunia. Namun sekarang Bukit Soeharto yang seluas 61.850 hektar berubah total menjadi kawasan pertambangan ilegal batu bara,” tegas politisi Partai Hanura itu.

“Kita Komisi VII DPR RI sudah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberi *police line* di kawasan tersebut dan meminta segera dilakukan audit lingkungan dan pengawasan oleh KLHK, serta kita akan mengembangkan dalam rapat-rapat teknis di Komisi VII nanti,” ungkap politisi dapil Sulsel itu.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Dardiansyah. Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa pembentukan Pansus terhadap persoalan Bukit Soeharto perlu digulirkan karena penambangan ataupun aktivitas yang dilakukan khususnya di kawasan yang dilindungi harus sesuai perundang-undangan yang berlaku. “Jangan sampai melanggar undang-undang dan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar,” tegasnya. ■ skr/sf



Komisi IV Dukung Kartu Tani Jateng

Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi mengapresiasi positif langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengeluarkan kartu tani bagi para petani di Jateng. Dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Jateng, politisi Partai NasDem itu menilai program kartu tani merupakan langkah terobosan Pemprov Jateng untuk mensejahterakan petani.

“Kami mendukung sepenuhnya atas kebijakan kartu tani yang bagus sekali. Namun, perlu diatasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Seperti di pinggiran desa, internetnya tidak bisa nyambung, geseknya tidak bisa lancar. Kalau geseknya tidak lancar, petani tidak bisa membeli pupuk. BRI juga harus sosialisasi kartu tani lebih gencar,” pungkas Fadholi di Semarang, Jateng, baru-baru ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono mengatakan, Pemprov Jateng terus berupaya melakukan penyempurnaan kartu tani.

Hal itu untuk memberikan kenyamanan bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi, yang tujuannya menyejahterakan petani.

“PR kita petani harus makmur. Saat ini kartu tani masih ada beberapa penyempurnaan. Dengan adanya kartu tani, para petani punya identitas,”

terangnya di hadapan Tim Kunker Komisi IV DPR RI.

Sri Puryono juga mengharapkan, Bulog Jateng dapat meningkatkan serapan gabah petani (sergap) agar petani makin makmur.

“Bulog Jateng sergapnya luar biasa. Mudah-mudahan kuotanya tidak hanya sepuluh persen. Tapi sesuai kuota permintaan petani. Harganya juga harus sesuai dengan HPP,” tambahnya.

■ si/sf



Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi bertemu dengan mitra kerja dan petani di Jateng

Foto: Sugeng | HR

Pelindo Diminta Fokus Atur Informasi Kapal Kepada Penumpang



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo beserta Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau fasilitas pelabuhan laut Manokwari, Papua Barat



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk fokus mengatur secara jelas mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal. Hal ini guna memberikan informasi secara jelas dan pasti kepada para penumpang kapal.

“Pemerintah sudah menugaskan Pelindo untuk mengatur aktifitas di pelabuhan. Oleh karena itu, Pelindo harus menjalankan tugasnya secara baik dan benar seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang (UU) Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Terutama dalam hal memberikan informasi kepada para penumpang kapal,” jelas Sigit usai meninjau fasilitas sarana dan prasarana serta pelabuhan laut Manokwari, Papua Barat, Rabu (01/8).

Politisi PKS itu menilai dengan adanya informasi yang jelas, guna mencegah terjadinya persoalan yang terkait dengan *human error*. “Misalnya ada calon penumpang baru yang ingin naik kapal, namun tidak tahu ada informasi tentang kedatangan dan keberangkatan kapal, lalu kemudian memaksa masuk karena tidak ingin menunggu lagi untuk kapal selanjutnya. Lalu hal itu yang menyebabkan kapal kelebihan muatan,” ungkapnya.

Karena menurut Sigit, percuma jika fasilitas keamanan kapal sudah tinggi, namun tidak dibarengi dengan pengaturan penumpang kapal secara optimal. “Karena memang sudah tugas Pelindo untuk mengatur kapasitas orang dan barang agar kapal tidak kelebihan muatan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berhubungan dengan keselamatan,” tuturnya.

Untuk itu, politisi daerah pemilihan Jawa Timur itu mendorong kepada Pelindo, Syahbandar serta otoritas pelabuhan untuk fokus dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya. “Jangan sampai lagi terjadi persoalan *human error* dikarenakan pengaturannya yang tidak jelas,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamajido mengusulkan, dalam hal keselamatan penumpang pada kapal perlu adanya kewajiban tersedianya sinyal tanda bahaya pada setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan.

“Alangkah lebih baik jika setiap kapal dilengkapi dengan sinyal tanda bahaya. Jadi nantinya sinyal berbunyi pada detik-detik sebelum terjadi kecelakaan terjadi dan informasinya langsung datang dari kapal. Sehingga nantinya *response time* dari Basarnas dalam menyelamatkan penumpang bisa lebih bagus dari sekarang,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, Rendy turut menyoroti perlu adanya perluasan pelabuhan untuk penampungan kontainer di Pelabuhan Manokwari. “Pelabuhannya sudah bagus, dermaganya juga bagus namun penampungan untuk kontainernya kecil nah ini menurut saya tidak seimbang. Saya kira ke depan Pemerintah juga harus berpikir dalam membangun suatu pelabuhan baru agar signifikan harus menyeimbangkan antara luas dermaga dengan penampungan kontainernya,” jelas politisi dapil Sulteng itu.

Foto: Titara | HR

■ tra/sf

Komisi VII Nilai Program Papua Terang Belum Maksimal

Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono menyatakan, program Papua Terang yang dijalankan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sangat baik, karena mengingat tingkat elektrifikasi di Papua cukup rendah. Meskipun program tersebut sudah dicanangkan cukup lama, ia menilai program ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan demografis di Papua sangat sulit berbeda dengan wilayah lain yang ada di Indonesia.

“Program Papua Terang ini sangat baik, namun segi demografis di sini sangat ekstrem seperti jarak pemukiman warga yang berjauhan-jauhan, bukit-bukit yang tinggi. Dan Papua ini sangat banyak pulau-pulau kecil. Nah hal-hal tersebut menyulitkan PLN untuk masuk ke dalam perumahan warga,” terang Agus saat mengikuti peninjauan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura, Papua, Selasa (31/7).

Menurut politisi PKB itu, tidak mungkin kalau Papua ini menggunakan sistem elektrifikasi seperti yang ada di Pulau Jawa. Maka dari itu, PLTMG ini harus selalu melakukan riset-riset untuk mengetahui sistem apa yang baik untuk digunakan di Papua ini.

“Memang Papua ini tidak bisa disamakan basis sistem kelistrikannya seperti di Jawa, namun harus melakukan intervensi bagaimana caranya supaya listrik ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat Papua. Bagaimana pun cara itu kami



Foto: Jayadi | HR

Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura, Papua

Pemprov Lampung Harus Lebih Perhatikan Gereja Katedral Bandar Lampung

Anggota Komisi VIII DPR RI Markus Nari mengaku sangat prihatin dengan bangunan Gereja Katolik Kristus Raja, Katedral, di Bandar Lampung, yang sudah hampir seratus tahun gereja tersebut berdiri, namun tidak ada renovasi perbaikan. Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan perhatian pada gereja itu.

“Sudah hampir seratus tahun Gereja Katedral ini berdiri, tetapi belum ada renovasi ulang. Kita menyentuh hati pemerintah supaya bisa melihat semua dan kita harapkan gedung ini bisa dibangun sebagai simbol umat Katolik yang ada di Lampung,” kata Markus, usai meninjau Gereja Katedral bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dengan didampingi Pimpinan Uskup Lampung Yohanes Harun Yuwono di Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (28/7).

Markus menambahkan, pihaknya mengakomodir semua agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Kristen



Foto: Azka | HR

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI tinjau Gereja Katolik Kristus Raja, Katedral, di Bandar Lampung

terus mendorong,” cetus politisi dapil DI Yogyakarta itu.

Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Maluku Papua PLN Ahmad Rofik mengatakan, pihaknya telah menggandeng beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas Cendrawasih. Hal ini perlu dilakukan agar membantu PLN dalam memudahkan penyebaran listrik, dan berharap mahasiswa tersebut memiliki terobosan yang sangat baik.

“Mereka kami sebar ke beberapa wilayah pedalaman agar mempelajari dari segi demografis yang ada di Papua, karena setiap daerah memiliki kesulitan yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya,” ujar Rofik.

Hingga saat ini menurutnya ada satu kesepakatan dari mahasiswa-mahasiswa tersebut yaitu PLN disarankan untuk menggunakan *battery storage*. “Mereka menyarankan menggunakan *battery storage*. Jadi nanti baterai itu bentuknya seperti tabung gas. Kalau habis, kami sediakan seperti *battery charger station*. *Battery storage* ini dapat digunakan hingga satu minggu dan mereka diwajibkan bayar sesuai pemakaian. Ini benar-benar merupakan strategi terobosan baru karena demografis di Papua ini sangat sulit,” paparnya. ■ *jay/sf*

Protestan, Katolik, Hindu, Budha agar bisa menyatukan seluruh keberadaan umat beragama di Indonesia. Sehingga semua umat itu bisa menjadikan Indonesia benar-benar sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbasas kepancasilaan.

“Kita berbeda-beda ragam suku bangsa dan agama, tetapi kita harus bisa menjadi satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas legislator Partai Golkar ini.

Ia pun berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bisa bersama-sama mendukung daripada kegiatan-kegiatan agama yang ada di Indonesia. Agar nantinya tidak ada perpecahan antar umat beragama. Dan juga tidak ada lagi perbedaan antar umat beragama.

“Ke depan bagaimana umat di Indonesia menjadi satu, tidak ada lagi perbedaan yang sangat signifikan antar umat beragama. Kita menjadi satu kesatuan di Provinsi Lampung, sehingga tidak terjadi konflik di mana-mana dan kecemburuan kecemburuan sosial. Kita harapkan konflik-konflik yang ada di Lampung ini tidak lagi ada, hanya karena masalah SARA,” harap politisi dapil Sulsel itu. ■ *azk/sf*

Komisi VIII Dorong Pemerintah Wujudkan Sekolah Ramah Anak

Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto mendorong semua sekolah di Indonesia wujudkan konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) agar dapat mewujudkan kondisi aman, nyaman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya. Sehingga proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan dengan baik dan anak bisa mengembangkan potensinya.

“ Sekolah Ramah Anak haruslah menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah. Sehingga anak dapat mengembangkan kreatifitasnya, seperti sekolah yang kita kunjungi sekarang,” kata Wenny di sela-sela Kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Ramah Anka di SMP Dwijendra Denpasar, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Selasa (31/7).

Wenny menjelaskan, sebenarnya konsep SRA sudah lama diterapkan di setiap sekolah-sekolah. Namun yang sudah memasyarakat adalah sekolah ramah anak bersih dan sekolah ramah anak yang berbasis lingkungan. Sedangkan sekolah ramah anak berbasis bebas kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah masih jarang diterapkan. Saat ini mulai disosialisasikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia .

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menjelaskan, untuk mewujudkan SRA ada beberapa hal yang harus di

perhatikan. Diantaranya menurut Wenny harus adanya komitmen dengan kebijakan, pelaksanaan proses pembelajaran dan tenaga pendidik yang memahami hak anak, sarana dan prasarana SRA, juga partisipasi ortu/ wali/ lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita harus bisa mengetahui potensi kekerasan terhadap anak yang bisa terjadi di sekolah diantaranya jenis kasus yang terjadi disekolah, yaitu kekerasan pada siswa oleh temannya, yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah, tindak kekerasan pada kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler dan tawuran antar pelajar, untuk itu harus ada cara penanganan dalam penanggulangan kekerasan, sanksi bagi pelaku dan upaya pencegahan kekerasan yang terjadi disekolah. Dengan melindungi anak dari kekerasan berarti kita sedang menyelamatkan masa depan bangsa,” jelas Wenny. ■ *man/sf*



Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto

RSD dr. Soebandi Jember Over Kapasitas

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meninjau Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Senin (30/7).

Dari hasil peninjauan, rumah sakit (RS) yang menjadi rujukan tujuh kabupaten di Jawa Timur itu mengalami over kapasitas, sehingga perlu ada penambahan pelayanan sarana dan prasarana serta alat-alat kesehatan maupun sumber daya manusia. Pasalnya ini menyangkut layanan RS itu kepada pasiennya.

“Penambahan pelayanan bukan hanya gedung-gedung tetapi juga sumber daya manusianya. Dokter IGD hanya ada 14 orang, dan baru tiga diantaranya yang berstatus pegawai negeri. Ini temuan yang jelas adanya kekurangan pelayanan,” kata Saleh di sela-sela peninjauan.

Politisi dari Fraksi PAN itu menambahkan, dalam peninjauan itu pihaknya melihat ruangan bayi, dan nampak bayi-bayi yang baru lahir namun diletakkan di luar kamar resminya. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Kita berharap rumah sakit ini bisa ditingkatkan kapasitasnya, supaya



Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meninjau Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi Jember

bisa maksimal melayani kepentingan masyarakat. Dan kita meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan RSD dr. Soebandi,” tandas politisi dapil Sumut itu.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan (F-PD) menambahkan, kehadiran Komisi IX DPR RI ke Jember ini dalam rangka menyerap aspirasi dan mendorong peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di RSD dr. Soebandi Jember.

“Rencana anggaran cukup besar, yaitu sekitar Rp167 miliar. Kami dari Komisi IX hadir dan berharap Kementerian

Kesehatan menyetujui anggaran itu. Sehingga tidak akan ada lagi orang yang menunggu-nunggu untuk menjalani operasi di RS ini,” harap politisi dapil Jatim itu.

Sementara itu, Direktur RSD dr. Soebandi Jember dr. Hendro Soelityono saat mendampingi Tim Kunker Komisi IX DPR RI menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian DPR RI kepada RS yang dipimpinnya. “Saya berharap dari kunjungan Anggota Komisi IX ini, ke depannya RSD dr. Soebandi akan semakin lebih baik,” harap Hendro. ■ afr/sf



Anggota Komisi IX DPR RI Handayani

Foto: Eko | HR

Kemenkes Didorong Lengkapi Alkes Daerah Kepulauan

Anggota Komisi IX DPR RI Handayani mengapresiasi para petugas di Puskesmas Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya meskipun pulau ini ada di daerah terpencil dan terdepan Indonesia, tapi pelayanan para petugasnya dinilai bagus dibanding daerah lain. Oleh sebab itu, dia menekankan agar pelayanan petugas yang bagus dibarengi dengan kelengkapan alat kesehatan (alkes) yang lengkap.

Legislator Dorong Pemkab Tana Toraja Dirikan BLK

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso mendorong pemerintah untuk mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan info dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tana Toraja bahwa di daerah ini, angka pengangguran masih terbilang tinggi, dengan pendidikan yang relatif masih rendah.

“Sehingga perlu sebuah keterampilan tambahan yang bisa dijadikan modal para pemuda-pemudi di sini. Sayangnya, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

belum memiliki BLK yang bisa dijadikan sarana bagi para pemuda untuk memperoleh berbagai keterampilan khusus,” ungkap Imam saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI



Foto: Ayu | HR

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso

dengan Wakil Bupati Tana Toraja, Sekda Toraja Utara dan jajaran, di Tana Toraja, Senin (30/7).

Ditambahkan Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, sejatinya BLK sangat diperlukan di daerah ini. Mengingat Tana Toraja juga merupakan daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Sehingga perlu keterampilan khusus untuk bisa mendampingi para turis asing tersebut. Misalnya keterampilan berbahasa asing.

Selain itu tambah Imam, melihat kondisi wilayah Tana Toraja dengan tanah yang subur, maka sangat diperlukan pelatihan di bidang pertanian dan peternakan. Dengan demikian, para pemuda di daerah tersebut dapat membangun kampung halamannya.

“BLK sangat bermanfaat. Saya pun dulu pernah mendapat pelatihan kerja berupa keterampilan elektronik di BLK. Sampai kemudian saya berhasil mengikuti test dan masuk menjadi anggota Polri,” tambah politisi dapil Jawa Tengah itu.

Untuk itu, Imam mendorong Pemkab Tana Toraja untuk mendirikan BLK. Ia juga menyarankan Disnakertrans Tana Toraja agar bekerjasama dengan pihak swasta untuk mendirikan BLK, atau memberikan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja di daerah tersebut. Sehingga pihak swasta yang notabene merupakan perusahaan-perusahaan juga bisa mengambil tenaga kerja dari peserta BLK tersebut. ■ ayu/sf

“Dinas Kesehatan diharap melangkapi alat-alat yang belum ada, seperti inkubator dan ambulans motor yang dibutuhkan di Puskesmas Pulau Derawan ini. Kalau ambulans mobil tidak pas dipakai di pulau ini,” papar Handayani saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Puskesmas Pulau Derawan, Berau, Kaltim, baru-baru ini.

Selain alkes, dia juga menekankan ketersediaan obat-obatan. Dia berharap agar kebutuhan obat di daerah setempat bisa dipenuhi. “Terkait obat-obatan, jangan sampai kekurangan pasokan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Pulau Derawan harus terpenuhi,” ujar Handayani.

Berkaitan dengan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau ini, Handayani

menyarankan agar tenaga kesehatan yang memiliki dedikasi dan sudah menunjukkan pengabdianya bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tenaga kesehatannya memang perlu diperhatikan, bahkan yang sudah lama mengabdikan di sini yang statusnya belum tetap harap diangkat menjadi ASN,” ungkap Anggota Dewan dari dapil Jambi ini.

Terkait obat-obatan, jangan sampai kekurangan pasokan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Pulau Derawan harus terpenuhi

Handayani juga mengungkapkan akan memperjuangkan persoalan kesehatan yang masih kurang diperhatikan dalam Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja. Dia mengatakan akan menyetujui anggaran yang betul-betul berpihak untuk daerah-daerah terpencil.

“Anggaran alat kesehatan seperti inkubator dan lainnya itu, kita setuju semua. Apalagi ambulans motor untuk daerah-daerah terpencil, saya akan sampaikan waktu rapat dengan kementerian, agar difasilitasi ambulans motor untuk daerah-daerah terpencil ini,” tandas politisi dari Fraksi PKB ini.

■ eko/sf

Komisi X Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tinggi

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana melihat bahwa pendidikan adalah modal sosial dasar yang sangat penting bagi membangun desain bangsa ini ke depan. Menurutnya, yang mendukung bangsa ini berkembang ke depannya bukan infrastruktur transportasi saja. Investasi infrastruktur pendidikan pun sangat penting dalam menggerakkan roda pembangunan.



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

Foto: Guntur | HR

Hal itu diungkapkan saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, Politeknik Negeri Bengkalis, Sekolah Tinggi Pariwisata Riau, Politeknik Kampar, Koordinator Kopertis Wilayah X, dan BAN PT di Pekanbaru, Riau, Senin (30/7).

“Yang kita temukan di Riau, banyak gedung yang sudah dibangun. Tapi selama 3 tahun terakhir belum diteruskan lagi, bila tidak dilanjutkan pembangunannya, nanti akan rusak dan sama saja dengan membangun dari awal,” kata Dadang.

Politisi Partai Hanura ini mendorong penyelesaian sarana dan prasarana yang

PPLP Menjadi Ujung Tombak Pembibitan Atlet

Komisi X DPR RI meninjau Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam peninjauan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai perlunya meninjau PPLP Sulsel ini, karena tempat ini merupakan ujung tombak pembibitan atlet olahraga berprestasi.

Ferdi, sapaan akrabnya itu menegaskan bahwa saat ini seringkali atlet di Indonesia mulai kehilangan gairah untuk berprestasi setelah melewati masa umur 23 tahun. Sehingga ia mengimbau harus ada program pendisiplinan yang lebih ketat.

“Kerap kali kita dalam kelompok-kelompok usia tertentu terutama usia belia, Indonesia bisa mengukir prestasi di tingkat Asia bahkan dunia. Tetapi setelah melewati masa 23 tahun ke atas, relatif terjadi penurunan. Yang harus dilakukan adalah pemfokusan pembinaan yang konsisten,” ujarnya saat memimpin peninjauan PPLP di Makassar, Sulsel, Selasa (31/7).

Untuk itu, dalam kunjungan ini politisi Partai Golkar itu menyatakan akan menyerap aspirasi dari para pelaksana bidang olahraga di Sulsel. Ada tiga tuntutan yang disampaikan perwakilan dari PPLP Sulsel kepada para Anggota Dewan untuk menunjang kinerja mereka dan para atlet dalam rangka perbaikan prestasi di bidang olahraga.

“Pertama kami kekurangan dana untuk makan harian para atlet. Kemudian honor para pengajar di sini juga sangat kecil, tidak sebanding dengan pekerjaan. Yang ketiga adalah



Foto: Erlangga | HR

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI berfoto bersama atlet pelajar PPLP Sulsel

mangkrak. Pembangunan infratraktur untuk sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang tidak berjalan lagi, perlu ditindaklanjuti secara serius oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan cara yang berbeda.

“Terhambatnya pembangunan infrastruktur pendidikan seperti labotarium, gedung kuliah, rumah sakit pendidikan, gelanggang mahasiswa itu menyebabkan terhambatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang optimal,” analisa Dadang.

Dadang menegaskan, *roadmap* pendidikan tinggi berorientasi pada dua hal yang tak terpisah antara infrastruktur dan SDM. Standar pendidikan nasional itu salah satunya adalah tentang penyediaan sarana dan prasarana yang memang harus sudah selesai di tahun 2019 mendatang.

“Dimana periode selanjutnya baru fokus pada pembangunan SDM seperti penyediaan kuantitas guru, peningkatan kapasitas guru dan dosen,” imbuh politisi dapil Jawa Barat II itu. ■ *gd/sf*

Kami akan meminta Kemenpora untuk melakukan kajian dan pendalaman apa yang menjadi kebutuhan para atlet dan pelatihnya. Akan diusahakan sebisa mungkin dapat terealisasi dan terjadi perubahan yang signifikan terhadap tiga tuntutan tersebut

saat ini kami kekurangan tenaga terapis di beberapa cabang olahraga,” ujar salah satu perwakilan pelatih di sela-sela peninjauan.

Menerima aspirasi tersebut, Ferdi memastikan pihaknya akan berusaha sebisa mungkin memperjuangkan hal-hal tersebut untuk dapat direalisasikan. Ia akan mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk secepatnya melakukan kajian.

“Kami akan meminta Kemenpora untuk melakukan kajian dan pendalaman apa yang menjadi kebutuhan para atlet dan pelatihnya. Akan diusahakan sebisa mungkin dapat terealisasi dan terjadi perubahan yang signifikan terhadap tiga tuntutan tersebut,” pungkasnya. ■ *eps/sf*

DPR Tuntut Penyelesaian Masalah Aset Negara di Bali

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno menyoroti kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Bali dan Nusa Tenggara, terkait adanya beberapa aset negara yang belum dilakukan penanganannya secara optimal.

“ Karena walaupun sudah di-*back up* oleh regulasi sampai peraturan menteri, penanganan aset negara itu juga masih mengalami kendala-kendala,” ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (30/7).

Michael juga mengkritisi efektifitas terbentuknya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam mengelola dan mengoptimalkan aset-aset Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan dikerjasamakan tersebut.

Perlu diketahui bahwa sejak hampir 3 tahun lalu, Kementerian Keuangan telah membuat Badan Layanan Umum (BLU) bernama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah juga menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Komisi XI DPR RI.

“Kerja sama antara Kemenkeu dan LMAN tersebut, sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara. Apalagi kita tahu bahwa ketergantungan APBN kita kepada pajak, dan harus kita tambah terhadap penerimaan negara dari bukan pajak. Alternatif-alternatif penerimaan

Kementerian Keuangan telah membuat Badan Layanan Umum (BLU) bernama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah juga menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Komisi XI DPR RI



Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno

Foto: eps | HR

negara seperti ini harus digali oleh lembaga seperti LMAN ini,” tandasnya.

Sehingga politisi PDI Perjuangan ini juga berharap supaya aset-aset negara yang dikelola Kemenkeu itu bisa dioptimalkan melalui LMAN yang sudah didukung oleh Komisi XI DPR RI melalui PMN tersebut.

Senada dengan Michael, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo juga memberikan perhatian khusus tentang pengelolaan aset, utamanya barang milik negara. Mengingat, di Bali ternyata ada aset-aset barang milik negara ini yang telah menghadapi gugatan.

“Kita menghendaki agar percepatan dari proses kepemilikan dari aset-aset tersebut dapat segera dilakukan,” tutup politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu. ■ *ndy/sf*



Foto: Iwan | HR

Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana dan Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau potensi pariwisata di Pulau Derawan, Berau, Kaltim

Komisi X Dorong Peningkatan Sarpras Pariwisata Berau

Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana mendorong peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, Berau merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang menarik, salah satunya adalah Kepulauan Derawan.

“Kita butuh sesuatu yang lebih untuk menggiatkan pulau ini secara ekonomis. Kita perlu menambah sarana dan prasarana, terutama untuk olahraga air. Sehingga bisa jalan berbarengan dengan wisata air,” kata Meli, panggilan akrabnya, saat mengikuti

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Berau, Kaltim, baru-baru ini.

Di sisi lain, politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten harus membuat masyarakat Kabupaten Berau, dan Kaltim pada umumnya, menyadari

Kepulauan Derawan memiliki sejumlah objek wisata bahari nan menawan yang masih belum diketahui banyak wisatawan.

Satu dari sejumlah objek wisata yang bisa anda nikmati adalah Taman Bawah Laut yang menyimpan jutaan pesona yang bisa membius para wisatawan domestik maupun mancanegara saat melakukan *snorkeling* di kawasan ini.

bahwa mereka memiliki pulau yang begitu potensial untuk dikembangkan menjadi satu daerah wisata unggulan.

“Di sini kita bisa lihat masih standar, karena masih dikelola oleh pemerintah kabupaten. Mungkin pemerintah pusat bisa melihat dan bisa membantu menjadikan ini satu kawasan wisata air, atau satu kawasan wisata bahari yang sebenarnya,” kata politisi dapil Sumatera Selatan itu.

Sementara itu, Bupati Berau Muharram mengatakan, pariwisata menjadi salah satu andalan yang saat ini dikembangkan Pemerintah Kabupaten Berau. Masyarakat dan pengusaha sektor pariwisata diminta untuk ikut berpartisipasi mengembangkan sektor ini dengan mengelola secara baik.

Ia menegaskan masyarakat yang berada di obyek wisata bisa mengelola kekayaan yang ada secara maksimal, sehingga memberikan hasil positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat sendiri.

Muharram berharap masyarakat tidak hanya mencari keuntungan sesaat saja. Namun harus bisa memikirkan dampak jangka panjang dalam menjaga kunjungan wisatawan. Seperti menawarkan harga-harga barang di obyek wisata serta penginapan untuk tidak mengambil keuntungan besar.

“Kita harapkan wisatawan yang datang ke sini bisa kembali lagi dengan membawa wisatawan lainnya. Ini harus kita pertahankan terus agar mereka tidak kapok datang ke sini,” jelasnya di hadapan Tim Kunker Komisi X DPR RI.

Kepulauan Derawan memiliki sejumlah objek wisata bahari nan menawan yang masih belum diketahui banyak wisatawan. Satu dari sejumlah objek wisata yang bisa anda nikmati adalah Taman Bawah Laut yang menyimpan jutaan pesona yang bisa membius para wisatawan domestik maupun mancanegara saat melakukan *snorkeling* di kawasan ini.

Untuk menuju Kepulauan Derawan, bisa menggunakan pesawat Bandara Sepinggang, Balikpapan ke Bandara Kalimantan, Berau selama satu jam. Perjalanan dilanjutkan menggunakan kapal atau *speed boat* melalui Pelabuhan Tanjung Redeb di Berau ke Pulau Derawan. Perjalanan memakan waktu hingga tiga jam. Namun jauhnya perjalanan, akan terbayar dengan keindahan Derawan. ■ iw/sf

Pemekaran Wilayah Seharusnya Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meyakini bahwa kebijakan pemekaran wilayah di masa lalu bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Provinsi Banten yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, yang memiliki potensi sumber daya alam cukup melimpah, pusat industri bahan baku kimia juga pabrik-pabrik dengan serapan tenaga kerja cukup tinggi.

Hal tersebut diungkapkannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan Perwakilan Wilayah Provinsi Banten, di Serang, Banten, Senin (30/7).

“Jika perputaran uang secara riil terjadi di daerah-daerah dan tidak menumpuk di pusat seperti saat ini, maka ini akan berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah dan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas,” imbuh Agun.

Politisi Partai Golkar ini juga menekankan bahwa pengalokasian berbagai pembangunan infrastruktur dan distribusi keuangan ke daerah harus dibuatkan konsep yang matang untuk mencegah terjadinya praktek korupsi di daerah-daerah.

“Saat ini kasus-kasus korupsi yang merajalela di daerah dijadikan alasan oleh pemerintah pusat untuk kembali mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Misalnya pendidikan SMA dan SMK yang tadinya dikelola pemerintah kabupaten/kota, saat ini sudah kembali ditarik kembali menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ungkap Agun.

Mantan Pimpinan Komisi II DPR RI yang juga pernah membidani lahirnya pemekaran beberapa provinsi baru ini menengarai ada upaya membangun isu-isu bahwa pemekaran wilayah itu gagal. Tolak ukurnya



Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa

Foto: Ocjije | HR

adalah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa kepala daerah.

“Hal seperti ini perlu diwaspadai dan diluruskan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Banten salah satu wilayah pemekaran yang mengalami perkembangan cukup pesat dan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya,” tandas Agun.

Legislator dapil Jawa Barat X ini juga mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus membuat program yang lebih aplikatif dan mudah diterapkan di desa. Banyaknya aturan-aturan dari pusat yang tujuan awalnya mengawal penggunaan Dana Desa pada sisi lain justru membuat para kepala desa khawatir dan enggan menggunakan Dana Desa.

“Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dijelaskan secara gamblang kepada para aparatur desa, agar mereka bisa bekerja secara profesional dan tidak lagi khawatir adanya kesalahan-kesalahan akuntansi mendasar,” pinta Agun.

Di lain pihak, Kepala BPKP Perwakilan Banten Bonardo Hutaeruk menjelaskan peran BPKP dalam mengawal penerimaan dan penggunaan anggaran daerah, membuat aplikasi sesuai kebutuhan dengan bimbingan teknis serta asistensi pemeriksaan pajak salah satunya di Kabupaten Tangerang.

“Kami juga melakukan *probity audit* atas pengadaan barang dan jasa strategis yang berisiko tinggi. Semua ini bagian dari upaya kami mencegah terjadinya praktik korupsi di Banten,” pungkas Bonardo. ■ oji/sf

“Ini memang salah satu komitmen Pimpinan Dewan untuk meningkatkan citra lembaga kita,” kata Indra usai memimpin rapat penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2018, dengan acara Ekspose Rencana Aksi Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins, di ruang rapat Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (08/8).

Indra menjelaskan, untuk menuju Reformasi Birokrasi yang diinginkan, Setjen dan BK DPR RI harus mampu melaksanakan 8 Area Perubahan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai komitmen dari pemerintah. Sehingga 8 Area Perubahan itu harus terus menerus diperbaiki.

“Ini pertemuan ketiga dari tim-tim yang membahas 8 Area Perubahan. Ada Area Perubahan 1 sampai 8 yang telah dipaparkan, dan ada lagi 2 tim itu yang memaparkan tentang *quick wins* yang berkaitan dengan Area Perubahan itu semua sudah dipaparkan,” ungkapnya.

Indra melanjutkan, rapat yang biasa disebut rapat *reboan* itu, hadir juga pegawai yang juga Agen Perubahan. Agen-agen Perubahan itu yang nanti akan melakukan *monitoring* terhadap rencana aksi ke depan. Dimana rencana aksi itulah yang nanti akan sama-sama dievaluasi, terkait apa saja yang akan di kerjakan dengan target waktu tertentu.

Menurut Indra, dalam rapat *reboan* itu selain digunakan untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, juga untuk membahas seluruh permasalahan di semua unit kerja yang ada di Setjen dan BK DPR RI, agar dapat segera terselesaikan.

Salah satunya peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini bermacam-macam, ada perundang-undangan, ada menyangkut semua *supporting* kepada anggota dewan.



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Foto: Ocjije | HR

Sekjen DPR Apresiasi Upaya Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai, sejauh ini rencana aksi yang dijalankan oleh Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI cukup bagus dan maju. Secara keseluruhan responnya sangat serius, mengingat ini adalah bagian dari komitmen Setjen dan BK DPR RI dalam persyaratan Reformasi Birokrasi.

Indra menambahkan, inti dari 8 Area Perubahan yang dicanangkan oleh KemenPAN-RB adalah semua Area Perubahan itu merupakan lini-lini dalam pemerintahan yang harus segera diperbaiki.

“Salah satunya peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini bermacam-macam, ada perundang-undangan, ada menyangkut semua *supporting* kepada anggota dewan. Tapi intinya 8 Area Perubahan itu adalah semua lini-lini di dalam pemerintahan yang harus segera diperbaiki,” tandasnya.

Indra juga menjelaskan soal *quick wins* yang merupakan langkah-langkah

yang akan segera dilakukan dalam 8 Area Perubahan itu. Contohnya, dalam 8 Area Perubahan tersebut masing-masing diambil 2 sampel yang salah satunya menyangkut pengembangan sistem informasi dan data statistik perjalanan luar negeri dalam rangka diplomasi parlemen, dan juga soal pembangunan aplikasi informasi pemantau peraturan perundang-undangan.

“Jadi ada di dua Area Perubahan ini dijadikan *quick wins*. Nanti di 8 Area Perubahan itu semua kita akan coba, supaya ada *quick wins*,” tutup Indra. ■ ndy/sf

Komisi V Dukung Percepatan Infrastruktur Yahukimo

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, infrastruktur merupakan kebutuhan utama masyarakat di kawasan pegunungan Papua, khususnya kabupaten Yahukimo yang terdiri dari 51 distrik dan 516 kampung. Mengingat akses transportasi darat masih menjadi kendala bagi masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut.

yang akan menghubungkan kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat dan pelabuhan Pepera. Menurutnya, dengan dibukanya akses jalan tersebut maka permasalahan pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat di wilayah pegunungan Papua akan terjawab.



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis bersama Bupati Yahukimo di Papua

Foto: Anne IHR

“Pembangunan infrastruktur di pegunungan tengah Papua kita berikan dukungan penuh, kalau bisa tahun ini diprioritaskan satu jembatan gantung untuk masyarakat Yahukimo,” ungkap Fary usai meninjau sejumlah ruas jalan nasional dan jembatan melalui udara di kawasan pegunungan tengah, Kabupaten Yahukimo, Papua, Rabu (01/8).

Fary memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang terus mendorong percepatan pembangunan yang berkaitan dengan akses jalan dan bandara sehingga dapat menjadi perhatian dan dukungan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, sejumlah pembangunan infrastruktur di tanah Papua harus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya sekedar fisik, tetapi harus ada perbedaan sebelum dan sesudah ada infrastruktur, seperti menurunnya harga-harga kebutuhan bahan pokok, sehingga manfaat pembangunan ini bisa dirasakan betul oleh masyarakat,” terang Fary.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPR RI John Siffy Mirin, ia mengatakan hingga kini harga sembako di wilayah pegunungan seperti beras belum stabil dan masih relatif tinggi. Karena itu, dirinya berharap pemerintah tidak hanya mengembangkan bandara perintis, tetapi juga membuka akses-akses jalan yang masih terisolasi untuk menekan disparitas harga.

Secara khusus, politisi daerah pemilihan Papua itu mendorong pemerintah segera memprioritaskan jalan nasional Dekai-Suator,

“Harapan kami jalan dari Dekai ke Suator 31 km dituntaskan dulu, karena begitu pelabuhan ini dibuka, mobilisasi logistik dari luar Yahukimo bisa masuk ke Dekai dan bisa jadi daerah sentra ekonomi pegunungan tengah sehingga tingkat kemahalan di wilayah pegunungan tengah bisa terjawab,” papar politisi dari F-PAN ini.

Sebelumnya Bupati Yahukimo Abock Busup mengapresiasi kedatangan Komisi V DPR RI. Menurutnya ini merupakan kali pertamanya DPR RI melakukan kunjungan kerja ke wilayah

Pegunungan Tengah Papua.

Ia mengatakan wilayah Yahukimo 99 persen terdiri dari pegunungan. Selama ini masyarakat berpindah dari distrik satu ke tempat lainnya hanya mengandalkan transportasi udara.

Melalui Komisi V DPR RI, ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan program-program prioritas tahun 2016-2021, antara lain: pembangunan ruas Jalan Jomothé-Panggema (Yahukimo-Jayawijaya), dan pembangunan ruas Jalan Keyke-Pepera (Yahukimo-Asmat).

Kemudian, pembangunan ruas Jalan Suru-Suru-Musaik-Amuma-Silimo (Yahukimo), pembangunan ruas Jalan Dekai-Koropun (Yahukimo), pembangunan ruas Jalan Herawe-Sobaham (Yahukimo-Jayawijaya). ■ ann/sf



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

mau motor jaman now? IKUTI LOMBA KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY

MEME (gambar, karikatur, video)

ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA: 19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018

PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: MOTOR JAMAN NOW

Juara I Rp 10 juta, Juara II Rp 7 juta, Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE:

SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN
LOMBA STAND UP COMEDY



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)